

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLITIK INDONESIA

¹*Putra Kaslin Hutabarat, ²Rizal Fahmi, ³Mina Umrah Pelas

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Syiah Kuala

E-mail: [1*putrakaslin@usk.ac.id](mailto:putrakaslin@usk.ac.id), [2rizalfahmi@usk.ac.id](mailto:rizalfahmi@usk.ac.id), [3minaumrahpelas@usk.ac.id](mailto:minaumrahpelas@usk.ac.id)

Abstrak

Kebijakan publik memiliki peran penting dalam menentukan arah pengambilan keputusan politik di Indonesia. Proses penyusunan kebijakan melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai aktor politik, institusi pemerintah, dan masyarakat sipil. Artikel ini berfokus pada analisis pengaruh dinamika politik, kepentingan kelompok, serta kondisi sosial dan ekonomi terhadap kebijakan publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan politik di Indonesia kerap didasarkan pada hasil negosiasi berbagai kepentingan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, faktor seperti desentralisasi, keterlibatan masyarakat, dan transparansi menjadi elemen kunci yang memengaruhi efektivitas kebijakan yang diterapkan. Abstrak ini memberikan wawasan terkait tantangan serta peluang dalam mewujudkan proses pengambilan keputusan politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Keyword: *Kebijakan publik, Pengambilan Keputusan, Partisipasi Masyarakat*

Abstrack

Public policy plays an important role in determining the direction of political decision-making in Indonesia. The policy-making process involves complex interactions between various political actors, government institutions, and civil society. This article focuses on the analysis of the influence of political dynamics, group interests, and social and economic conditions on public policy in Indonesia. This study uses a qualitative approach through literature studies and policy analysis. The findings show that political decision-making in Indonesia is often based on the results of negotiations between various interests, both at the local and national levels. In addition, factors such as decentralization, community involvement, and transparency are key elements that influence the effectiveness of the policies implemented. This abstract provides insight into the challenges and opportunities in realizing a political decision-making process that is oriented towards community interests.

Keywords: *Public policy, Decision Making, Community Participation*



This work is licensed [under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Kebijakan (*policy*) merupakan topik diskusi yang sangat menarik dan kompleks. Kebijakan adalah proses berpikir yang telah dikenal dan diterapkan sejak lama dalam sejarah peradaban manusia. Istilah "kebijakan publik" sering kali kita temui baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks akademis, seperti dalam pembelajaran ilmu politik. Istilah kebijakan dapat memiliki cakupan yang luas,

misalnya dalam frasa seperti "Kebijakan Luar Negeri Indonesia," "Kebijakan Ekonomi Jepang," atau "Kebijakan Pertanian di Negara-negara Berkembang." Selain itu, istilah ini juga bisa merujuk pada hal yang lebih spesifik, misalnya kebijakan pemerintah mengenai debirokratisasi dan deregulasi.

Menurut Charles O. Jones (1984:25) istilah "kebijakan" sering digunakan dalam praktik sehari-hari untuk menggambarkan berbagai kegiatan atau keputusan yang berbeda (Muktamar, 2023). Istilah ini kerap disamakan dengan tujuan, program, keputusan, standar, proposal, atau grand design. Secara umum, kebijakan mengacu pada tindakan seorang aktor (baik itu pejabat, kelompok, atau lembaga pemerintah) atau beberapa aktor dalam bidang tertentu. Pengertian ini cukup memadai untuk diskusi sehari-hari, tetapi kurang memadai untuk pembahasan ilmiah yang sistematis, terutama dalam analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan definisi atau konsep kebijakan publik yang lebih spesifik dan tepat. Publik merujuk pada sekelompok individu yang memiliki kepentingan tertentu dalam hubungan sosial antar manusia. Istilah "publik" berasal dari bahasa Inggris *public*, yang secara etimologis diturunkan dari bahasa Latin *publicus*, yang berarti "untuk orang" (*for populus*). Kata *populus* sendiri berasal dari kata *populus*, yang memiliki arti "orang" atau "masyarakat" (*people*).

Kebijakan publik adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan bersama, bersifat mengikat bagi seluruh warga, dan harus dipatuhi. Setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, di mana sanksi tersebut dijatuhkan oleh lembaga yang bertugas memberikan hukuman biasanya dilakukan secara terbuka di hadapan masyarakat. Kebijakan publik juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks tertentu. Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada dengan tujuan mendukung pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan (Hamidah, 2020).

Setiap organisasi perlu menjalankan proses perencanaan untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti perencanaan produksi, rekrutmen karyawan baru, peluncuran produk baru, hingga perencanaan anggaran. Perencanaan adalah langkah dasar bagi organisasi dalam menetapkan tujuan dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk merumuskan tujuan dan sasaran dengan jelas sebelum memulai proses perencanaan. Hal ini memberikan panduan dan kerangka kerja yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam setiap aspek operasional (Muktamar, 2023). Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam fungsi manajemen, terutama saat organisasi menghadapi perubahan lingkungan eksternal yang cepat dan dinamis. Di era globalisasi, perencanaan menjadi aspek yang sangat penting dan memerlukan pendekatan yang rasional serta prosedural secara sistematis, bukan hanya mengandalkan intuisi atau perkiraan.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana tercermin dari subjudulnya, mengarah pada metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai situasi atau kondisi nyata sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Menurut Ahmad Tanzeh Suyitno (2006) penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait fenomena yang dialami oleh subjek penelitian (Zaini et al., 2023). Fenomena ini dapat berupa berbagai aspek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, maupun tindakan individu atau kelompok. Hasil penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk deskripsi yang dirumuskan menggunakan kata-kata dan bahasa, bukan dalam bentuk angka atau statistik.

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa perumusan kebijakan publik di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan politik, dinamika kekuasaan, dan tekanan dari kelompok kepentingan. Proses ini sering melibatkan negosiasi antara aktor-aktor politik di tingkat pusat dan daerah, serta partai-partai politik yang berkuasa. Kemudian keputusan politik sering kali mencerminkan kompromi antara berbagai kelompok kepentingan, baik dari dalam pemerintah maupun dari luar. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan sering kali merupakan hasil dari negosiasi antara kelompok-kelompok politik yang bersaing. Namun disisi lain, dalam hal desentralisasi dan partisipasi publik juga memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang mana hal ini membawa dimensi baru dalam implementasi kebijakan, di mana pemerintah daerah memainkan peran yang lebih besar dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal (Pramono, 2020).

Dalam paradigma tertentu, kebijakan desentralisasi dapat dilihat secara kritis terhadap masalah kebijakan pemerintah daerah yang hegemoni dalam pengelolaan sistem pendidikan. Hal ini disebabkan oleh dominasi elit politik lokal dalam proses kebijakan pendidikan. Alasannya adalah bahwa sistem birokrasi seringkali menempatkan “kekuasaan” sebagai faktor paling menentukan dalam pengambilan keputusan. Dominasi ini dapat mengarah pada pengambilalihan kendali dari aktor-aktor yang lebih luas, sehingga mengurangi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan politik di Indonesia (Bida, 2021).

Carl J. Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Definisi ini mencakup pengenalan hambatan-hambatan dan peluang-peluang yang terkait dengan pelaksanaan usulan kebijakan tersebut, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Subianto, 2020). Analisis kebijakan adalah aktivitas yang bersifat praktis dan intelektual, yang bertujuan untuk menghasilkan pemahaman secara teliti, kritis, serta menyampaikan pengetahuan terkait proses pelaksanaan kebijakan. Analisis kebijakan dapat dipandang sebagai

suatu disiplin ilmu yang memanfaatkan berbagai metode pengkajian dalam konteks diskusi dan argumentasi politik untuk menghasilkan, mengevaluasi secara kritis, serta mengomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tersebut (Safitri, Nuarizal, & Gistituati, 2021). Konsep pelaksanaan kebijakan di Indonesia berlandaskan pada prinsip good governance. Untuk mencapai good governance, terdapat beberapa dimensi pencapaian yang perlu diperhatikan (Desrinelti, Afifah, & Gistituati, 2021) :

- a. **Konsistensi:** Pelaksanaan kebijakan akan berhasil jika dilakukan secara konsisten sesuai dengan norma dan prosedur yang berlaku.
- b. **Transparansi:** Transparansi terwujud ketika ada kebebasan akses bagi publik atau kelompok yang memiliki kepentingan. Informasi harus terbuka, mudah diakses, mudah dipahami, dan tersedia secara memadai.
- c. **Akuntabilitas:** Pelaksanaan kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. **Keadilan:** Keadilan dalam pelaksanaan kebijakan publik berarti tidak membedakan pelayanan terhadap golongan tertentu dan tidak bersikap diskriminatif.
- e. **Partisipatif:** Partisipasi berarti masyarakat berperan dalam keterlibatan pada pelaksanaan kebijakan, tidak hanya sebagai pendukung, tetapi juga sebagai sarana untuk evaluasi dan pengontrolan terhadap wewenang pelaksana kebijakan.
- f. **Efektivitas:** Efektivitas berhubungan dengan pencapaian hasil kebijakan berdasarkan tindakan yang rasional terkait layanan atau produk. Pelaksana kebijakan dikatakan efektif jika sasaran dan tujuan yang ditetapkan tercapai.
- g. **Efisiensi:** Efisiensi berhubungan dengan pemaksimalan kuantitas sumber daya seperti pencapaian tujuan, penggunaan manusia, biaya, waktu, dan peralatan lainnya. Efisiensi akan berdampak pada efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Dalam penerapan good governance di Indonesia didorong oleh dua faktor mendasar, dikutip dari jurnal (Riska Chyntia Dewi & Suparno Suparno, 2022):

1. **Tuntutan Eksternal:** Pengaruh globalisasi memaksa Indonesia untuk menerapkan good governance. Istilah ini mulai muncul di Indonesia pada akhir tahun 1990-an, seiring dengan interaksi antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara luar dan lembaga donor internasional yang menyoroti kondisi objektif situasi perkembangan ekonomi dan politik di dalam negeri.
2. **Tuntutan Internal:** Masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab krisis multidimensional saat ini adalah adanya abuse of power yang terwujud dalam praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang telah begitu merajalela di berbagai aspek kehidupan. Masyarakat menilai praktik KKN yang paling mencolok baik dalam kualitas maupun kuantitasnya terjadi di cabang-cabang pemerintahan, terutama di eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Menurut Anderson (1979: 3-4) dikutip dari jurnal (Pramono, 2020), konsep kebijakan publik memiliki beberapa implikasi penting dalam pengambilan suatu keputusan. Beberapa implikasi tersebut yakni :

- Pertama, pembahasan mengenai kebijakan publik lebih berfokus pada maksud atau tujuan, bukan pada perilaku acak atau tanpa arah. Kebijakan publik dalam sistem politik modern tidak terjadi secara spontan, melainkan dirancang oleh aktor-aktor yang terlibat dalam sistem politik tersebut.
- Kedua, kebijakan adalah pola atau arah tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah, bukan hanya serangkaian keputusan tunggal. Kebijakan mencakup keputusan untuk menetapkan peraturan atau undang-undang, sekaligus implementasinya.
- Ketiga, kebijakan publik mencerminkan tindakan nyata pemerintah dalam mengatur berbagai aspek seperti perdagangan, pengendalian inflasi, atau pengadaan perumahan rakyat, bukan sekadar keinginan pemerintah. Sebagai contoh, jika pemerintah menetapkan undang-undang mengenai upah minimum tetapi tidak ada langkah konkret untuk melaksanakannya sehingga tidak memengaruhi perilaku ekonomi, maka kebijakan tersebut bisa disebut sebagai *nonregulasi* upah.
- Keempat, kebijakan publik dapat bersifat positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan tindakan nyata pemerintah untuk menangani suatu masalah. Sebaliknya, secara negatif, kebijakan dapat berupa keputusan untuk tidak mengambil tindakan atau tidak terlibat dalam isu tertentu. Pemerintah dapat memilih untuk tidak campur tangan dalam bidang tertentu, baik secara umum maupun khusus, dan keputusan tersebut tetap merupakan bentuk kebijakan yang dapat membawa dampak besar bagi masyarakat atau kelompok tertentu.

Masalah kebijakan sangat bergantung pada pola keterlibatan para pemangku kepentingan kebijakan (*policy stakeholders*), karena mereka tidak hanya memengaruhi tetapi juga dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan (*policy environment*) merupakan konteks spesifik di mana berbagai peristiwa seputar isu kebijakan berlangsung, memengaruhi serta dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri.

Oleh karena itu, sistem kebijakan adalah proses yang bersifat dialektis, di mana dimensi objektif dan subjektif dalam pembuatan kebijakan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari praktiknya (Fika, Fauzi, & Qurtubi, 2023). Analisis kebijakan dalam menyelesaikan berbagai persoalan menggunakan teori, metode, dan teknik dari bidang ilmu sosial, ilmu politik, serta ilmu psikologi. Proses analisis kebijakan melibatkan beberapa tahapan, yaitu: perumusan masalah, peramalan dampak kebijakan di masa depan, pemberian rekomendasi kebijakan, dan pemantauan hasil kebijakan yang telah diterapkan. Menurut Indiahono, D. (2009) dikutip dari jurnal (Subianto, 2020), terdapat tiga alasan utama mengapa analisis kebijakan lebih menonjol dalam sektor publik. Pertama, realitas menunjukkan bahwa persoalan dalam sektor publik jauh lebih kompleks dibandingkan sektor swasta. Kompleksitas

ini disebabkan oleh keterlibatan berbagai pihak dengan beragam kepentingan. Oleh karena itu, sektor publik membutuhkan metode yang lebih komprehensif untuk menemukan solusi efektif terhadap masalah-masalah yang dihadapinya.

Kebijakan publik yang menghasilkan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari komoditas politik yang berhubungan dengan kepentingan publik. Namun, kebijakan publik dapat disesuaikan dan diperbaiki jika terjadi dinamika yang berdampak terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan publik bersifat fleksibel, dapat diubah dan disesuaikan sesuai dengan perkembangan pembangunan. Proses perbaikan dan penyesuaian ini dipengaruhi oleh penilaian dari masyarakat.

Kebijakan publik tidak akan terlaksana tanpa adanya proses pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan tersebut. Proses pelaksanaan kebijakan didasarkan pada mekanisme, sumber daya, dan keterkaitan program kebijakan. Pelaksanaan kebijakan adalah aktivitas lanjutan dari perumusan dan pengesahan kebijakan, yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan tersebut. Dampak dari pelaksanaan kebijakan melibatkan konsekuensi yang timbul baik hasil yang diharapkan (intended) maupun hasil yang tidak diharapkan (spillover negative effect) dan setiap kebijakan yang ditetapkan pasti memiliki dampak (Desrinelti et al., 2021).

Setelah menetapkan suatu kebijakan yang berdampak pada publik maka diperlukan evaluasi sebagai bentuk penilaian terhadap akuntabilitas dan kinerja dari kebijakan publik yang dilaksanakan. Evaluasi ini penting untuk mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan dan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan efisien dalam menjalankan fungsinya. Melalui evaluasi, dapat diketahui dampak dari kebijakan tersebut serta potensi perbaikan yang perlu dilakukan. Tujuan dari evaluasi pada tahap ini adalah untuk menghindari penilaian awal yang mungkin tidak akurat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi ini juga memberikan informasi tentang kebijakan yang sedang dilaksanakan. Evaluasi pada tahap ini dapat memberikan pengkajian awal mengenai pengaruh terhadap lingkungan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Jika terdapat kesalahan dalam proses pelaksanaan, evaluasi ini memungkinkan perbaikan melalui penilaian ongoing dan proses rekomendasi yang diambil segera untuk mengatasi masalah tersebut (Desrinelti et al., 2021).

Kesimpulan

Kebijakan merupakan topik yang menarik dan kompleks dalam diskusi akademis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan mengacu pada serangkaian proses berpikir dan tindakan yang diterapkan sejak lama dalam sejarah manusia, baik dalam skala luas seperti kebijakan negara maupun dalam bentuk yang lebih spesifik seperti kebijakan pemerintah. Konsep "kebijakan publik" mencakup berbagai aspek, dari

perencanaan dan implementasi hingga evaluasi, dan sangat penting dalam mengatur kehidupan bersama. Penting bagi organisasi untuk merencanakan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, terutama di era globalisasi yang menuntut pendekatan yang lebih rasional dan prosedural dalam perencanaan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan publik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, dinamika kekuasaan, dan tekanan dari kelompok kepentingan. Proses perumusan ini sering kali melibatkan negosiasi antara aktor politik di tingkat pusat dan daerah, serta partai-partai politik yang berkuasa, yang mencerminkan kompromi antara berbagai kelompok kepentingan. Dalam konteks desentralisasi dan partisipasi publik, pemerintah daerah diberikan peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, membawa dimensi baru dalam implementasi kebijakan. Evaluasi terhadap kebijakan publik menjadi penting untuk menghindari penilaian awal yang tidak akurat dan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan efisien dalam menjalankan fungsinya, memberikan informasi serta pengkajian awal mengenai dampaknya terhadap lingkungan

Referensi

- [1]. Bida, O. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Disparitas Pendidikan Lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 228–248. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.59>
- [2]. Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- [3]. Fika, N., Fauzi, A., & Qurtubi, A. (2023). Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern. *Journal on Education*, 05(04), 16737–16747.
- [4]. Hamidah, D. (2020). Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1), 34–44.
- [5]. Mukhtar, A. (2023). Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Kebijakan dalam Perilaku Organisasi. *Journal of International Multidisciplinary Research*. 1(1), 65-81
- [6]. Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: Unisri Press.
- [7]. Riska Chyntia Dewi, & Suparno Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- [8]. Safitri, U., Nuarizal, A., & Gistituati, N. (2021). Urgensi analisis kebijakan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.29210/3003818000>
- [9]. Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT.*
- [10]. Zaini, P. M., Zaini, P. M., Saputra, N., Penerbit, Y., Zaini, M., Lawang, K. A., & Susilo, A. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*